



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BAMBANG KUSRIYANTO**
2. Jabatan : **KETUA DPRD**
3. NHK : **529408**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.290.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 305 m2/90 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
2. Tanah Seluas 1160 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.740.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **211.750.000**

1. MOTOR, HONDA AT/VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VEGA R Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000
3. MOBIL, TOYOTA FJ 40/JEEP Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000
4. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA/MINIBUS Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
5. MOBIL, TOYOTA CAMRY 2200/SEDAN Tahun 2000, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **15.824.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **431.468.563****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **2.949.042.563****III. HUTANG** Rp. **730.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **2.219.042.563**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.